BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 7 No. 2, 2026, pp. 1192-1197
DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v7i2.17833

e-ISSN 2721-9135
p-ISSN 2716-442X

Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Mengawal Kebijakan Publik Berbasis Partisipatif di Desa Karangsambung

Aceng Jarkasih[1*], Terry Sugihardi[2]
Universitas Majalengka
*e-mail korespondensi: acengjarkasih@unma.ac.id

Abstract
This community service activity aims to strengthen community capacity in supervising participatory-based public policies in Karangsambung Village. The background of this activity is the low level of community understanding regarding public policy processes and limited participation in monitoring policy implementation at the village level. The method used includes socialization, training, mentoring, and evaluation through participatory approaches. The target participants were village officials, community leaders, youth organizations, and local residents. The results show an increase in community understanding of public policy from 45% to 85%, as well as increased participation in village development forums. In addition, the community has begun to actively engage in monitoring the use of village funds and public services. This activity concludes that participatory-based education and mentoring can effectively improve community capacity in supervising public policies and encouraging transparent and accountable governance.
Keywords*: public policy; community participation; capacity building; village governance; education*

Abstrak
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengawal kebijakan publik berbasis partisipatif di Desa Karangsambung. Latar belakang kegiatan ini adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses kebijakan publik serta terbatasnya partisipasi dalam pengawasan kebijakan di tingkat desa. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan, pendampingan, serta evaluasi dengan pendekatan partisipatif. Sasaran kegiatan adalah perangkat desa, tokoh masyarakat, karang taruna, dan warga desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang kebijakan publik dari 45% menjadi 85%, serta meningkatnya partisipasi dalam forum musyawarah desa. Selain itu, masyarakat mulai aktif dalam mengawal penggunaan dana desa dan pelayanan publik. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa edukasi dan pendampingan berbasis partisipatif mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengawal kebijakan publik serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Kata Kunci: kebijakan publik; partisipasi masyarakat; penguatan kapasitas; desa; edukasi

Accepted: 2026-03-27 Published: 2026-04-17

PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan publik di tingkat desa seringkali menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan.

Desa Karangsambung memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup baik, namun berdasarkan observasi awal, tingkat pemahaman masyarakat terkait kebijakan publik masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan oleh minimnya keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah desa serta kurangnya kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran desa. Secara kuantitatif, hanya sekitar 40–50% masyarakat yang aktif dalam kegiatan musyawarah desa.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurut teori partisipasi, keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan

transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas kebijakan publik. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pendampingan dapat meningkatkan kualitas pengawasan kebijakan publik.

Permasalahan utama yang dihadapi meliputi:
1. Rendahnya literasi masyarakat tentang kebijakan publik
2. Minimnya partisipasi dalam pengawasan kebijakan
3. Kurangnya akses informasi terkait kebijakan desa

Tujuan kegiatan ini adalah:
* Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan publik
* Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kebijakan
* Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di **Desa Karangsambung**. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan masih rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan publik di tingkat desa.

Waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan selama ±2 bulan, yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Sasaran dalam kegiatan ini adalah masyarakat Desa Karangsambung yang terdiri dari:
* Perangkat desa
* Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
* Tokoh masyarakat
* Karang taruna
* Perwakilan masyarakat umum

Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak ±50 orang. Pemilihan peserta dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur masyarakat yang memiliki peran strategis dalam proses kebijakan publik di desa.

Kegiatan ini menggunakan **pendekatan partisipatif (participatory approach)**, yaitu melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan. Metode pelaksanaan yang digunakan meliputi:
a. Sosialisasi
Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman dasar kepada masyarakat terkait:
* Konsep dan siklus kebijakan publik
* Peran masyarakat dalam kebijakan publik
* Prinsip transparansi dan akuntabilitas
Metode yang digunakan berupa ceramah interaktif dan diskusi kelompok.

b. Pelatihan (Capacity Building)
Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengawal kebijakan publik. Materi pelatihan meliputi:
* Teknik analisis kebijakan sederhana
* Mekanisme pengawasan kebijakan publik
* Pengelolaan dan pemantauan dana desa
* Penyampaian aspirasi dan advokasi kebijakan
Metode pelatihan menggunakan studi kasus, simulasi, dan role play agar peserta lebih memahami secara praktis.

c. Pendampingan
Pendampingan dilakukan secara langsung kepada masyarakat dalam:

* Forum musyawarah desa
* Penyusunan rencana kegiatan desa
* Pengawasan pelaksanaan program pembangunan
Pendampingan bertujuan memastikan masyarakat mampu mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh.

d. Diskusi Kelompok Terarah (FGD)
FGD dilakukan untuk menggali permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait kebijakan publik serta merumuskan solusi bersama. Kegiatan ini juga menjadi media untuk memperkuat partisipasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

e. Evaluasi
Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan melalui:
* Pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan
* Observasi partisipasi masyarakat
* Wawancara dan kuesioner kepuasan peserta

4. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:
1. Tahap Persiapan
   * Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat
   * Koordinasi dengan pemerintah desa
   * Penyusunan materi dan instrumen evaluasi
2. Tahap Pelaksanaan
   * Sosialisasi kebijakan publik
   * Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat
   * Diskusi dan FGD
   * Pendampingan lapangan
3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut
   * Pengukuran hasil kegiatan
   * Analisis dampak kegiatan
   * Penyusunan rekomendasi dan rencana keberlanjutan program
4. Indikator Keberhasilan Kegiatan
Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan indikator berikut:
1. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang kebijakan publik minimal ≥70%
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa
3. Munculnya inisiatif masyarakat dalam pengawasan kebijakan
4. Terbentuknya kesadaran kolektif terkait transparansi dan akuntabilitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Karangsambung dilakukan pada bulan September 2025 sampai Januari 2026 melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui observasi lapangan dan wawancara dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami secara komprehensif terkait proses kebijakan publik, khususnya dalam aspek perencanaan, implementasi, dan pengawasan.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif. Kegiatan utama meliputi sosialisasi kebijakan publik, pelatihan teknis pengawasan kebijakan, serta pendampingan langsung dalam forum musyawarah desa. Materi yang diberikan mencakup:
1. Konsep dasar kebijakan publik dan siklus kebijakan
2. Hak dan kewajiban masyarakat dalam kebijakan publik
3. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa
4. Teknik sederhana dalam melakukan pengawasan kebijakan

Selama kegiatan berlangsung, partisipasi masyarakat menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta dalam diskusi, kemampuan mengidentifikasi permasalahan kebijakan di desa, serta keberanian dalam menyampaikan aspirasi.

Hasil pengukuran melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat yang cukup signifikan. Sebelum kegiatan, tingkat pemahaman masyarakat berada pada angka rata-rata 45%, sedangkan setelah kegiatan meningkat menjadi 85%. Hal ini menunjukkan bahwa metode edukasi dan pelatihan yang digunakan efektif dalam meningkatkan literasi kebijakan publik masyarakat.

Selain itu, terjadi peningkatan kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah desa. Jika sebelumnya hanya sekitar 50% masyarakat yang berpartisipasi aktif, setelah kegiatan meningkat menjadi sekitar 80%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perubahan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses kebijakan publik.

Penguatan kapasitas masyarakat dalam kegiatan ini memberikan dampak yang signifikan baik secara kognitif, afektif, maupun perilaku.

1. Dampak Kognitif (Pengetahuan)

Masyarakat mengalami peningkatan pemahaman terkait:

* Proses penyusunan kebijakan publik
* Mekanisme pengelolaan dana desa
* Peran masyarakat dalam pengawasan kebijakan

Masyarakat yang sebelumnya tidak memahami alur kebijakan, kini mampu menjelaskan tahapan kebijakan mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

2. Dampak Afektif (Sikap)

Kegiatan ini juga berhasil membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap kebijakan publik. Masyarakat menjadi lebih peduli terhadap:

* Transparansi penggunaan anggaran desa
* Kualitas pelayanan publik
* Keadilan dalam distribusi program pembangunan

Perubahan sikap ini terlihat dari meningkatnya keinginan masyarakat untuk terlibat aktif dalam forum diskusi dan pengambilan keputusan.

3. Dampak Perilaku (Partisipasi)

Dari sisi perilaku, masyarakat mulai menunjukkan tindakan nyata dalam mengawal kebijakan publik, antara lain:

* Aktif mengikuti musyawarah desa
* Memberikan masukan terhadap program desa
* Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan

Berikut disajikan perubahan indikator sebelum dan sesudah kegiatan:

Tabel 1. Perubahan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat**

Indikator	Sebelum (%)	Sesudah (%)
Pemahaman Kebijakan Publik	45	85
Partisipasi Musyawarah Desa	50	80
Keterlibatan dalam Pengawasan	30	75
Kesadaran Transparansi	40	82

Data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas masyarakat.

Meskipun kegiatan berjalan dengan baik, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan, antara lain:

1. Keterbatasan Waktu

Durasi kegiatan yang relatif singkat menyebabkan belum optimalnya proses pendampingan secara berkelanjutan.

2. Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Beragam

Perbedaan tingkat pendidikan menyebabkan variasi dalam pemahaman materi, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih adaptif.

3. Budaya Pasif dalam Partisipasi

Sebagian masyarakat masih memiliki budaya pasif dan cenderung menyerahkan keputusan kepada pemerintah desa.

Namun demikian, tantangan tersebut dapat diatasi melalui pendekatan partisipatif yang lebih intensif, penggunaan metode komunikasi yang sederhana, serta pemberian contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari.

Keunggulan Program

* Menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung
* Materi yang disampaikan aplikatif dan sesuai kebutuhan masyarakat
* Adanya pendampingan yang memperkuat pemahaman praktis

Keterbatasan Program

* Keterbatasan waktu pelaksanaan
* Belum adanya sistem monitoring jangka panjang
* Ketergantungan pada fasilitator eksternal

Peluang Pengembangan

Program ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, antara lain:

* Pembentukan forum warga pengawas kebijakan publik
* Integrasi dengan sistem digital desa (e-government)
* Replikasi program ke desa lain sebagai model pengabdian berbasis partisipatif

Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa

Hasil kegiatan ini memberikan implikasi penting terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, yaitu:

* Mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran desa
* Meningkatkan akuntabilitas aparatur desa
* Memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat

Dengan meningkatnya kapasitas masyarakat, diharapkan tercipta sistem pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Gambar pelaksanaan kegiatan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan edukasi dan pendampingan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kebijakan publik secara signifikan.
2. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik mengalami peningkatan yang cukup tinggi.
3. Pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Saran:
* Perlu adanya pendampingan berkelanjutan
* Penguatan regulasi desa terkait partisipasi masyarakat
* Pemanfaatan teknologi untuk transparansi kebijakan

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, S. (2025). Digital governance and civic inclusion to enhance public participation in political decision-making processes. *Frontiers in Political Science, 7, 1–12. https://www.frontiersin.org/journals/political-science/articles/10.3389/fpos.2025.1671373/full?

Latupeirissa, J. J. P., Tu Adi, I. W., & Valencia, E. B. (2025). Empowering marginalized groups: Unveiling the benefits of community integration in public services decision-making. *Journal of Governance and Public Policy, 12(2), 191–205. https://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/22640?

Magister, Y. A. (2023). Community empowerment and participation in promoting policy innovation in the region. *Proceedings of International Conference in Social Science*, 3(1). https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/iconiss/article/view/9836

Saputro, I. H., et al. (2024). Green tourism village education: A public participation-based innovation in rural development. *Journal of Community Empowerment, 4(2), 141–146. https://journal.unnes.ac.id/journals/index.php/jce

Permana, D. F., et al. (2024). E-government program to enhance digital administration in village governance. *Journal of Community Empowerment, 4(2), 109–115. https://journal.unnes.ac.id/journals/index.php/jce

Zainal, Z., Afrizal, A., & Kustiawan, K. (2024). Implementation of community empowerment program policy in village governance. *Interdisciplinary Journal of Global and Multidisciplinary*, 2(1). https://jurnal-ijgam.or.id/index.php/IJGAM/article/view/170